

**TUGAS PAPER MATA KULIAH KEBUDAYAAN BALI:
UPACARA TRADISI MESATIA DI BALI PANDANGAN
HUMANISME DAN HAM**



Nama Anggota Kelompok

Nauval Azhar Romadhoni (2301561007)
I Gde Bayu Samudra (2301561003)
Eleonora Tresiana Natali Rabela (2301561024)
Gymnastiar Pratama (2301561023)

PROGRAM STUDI
ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA

2024

Abstrak

Kematian dalam semua pandangan agama menyebutkan adalah sebuah satu peristiwa yang tidak bisa dihindari dan semua akan merasakan apa itu kematian, secara universal kematian merupakan perpindahan ruh yang ada didalam diri manusia yang kemudian akan menghadapi dunia baru yaitu dunia penebusan dosa yang dalam hal ini menurut banyak kepercayaan berbeda-beda. Tradisi mesatia di Bali merupakan tradisi yang mengharuskan janda dari suami yang sudah meninggal untuk mempersembahkan dirinya sebagai bukti kesetiaannya. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana upacara mesatia itu dilakukan dan apa landasan dilakukannya upacara mesatia hingga diberhentikannya upacara mesatia itu dengan alasan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang disajikan dalam satu pembahasan dengan teori pandangan masyarakat Bali modern, Humanisme dan HAM.

Kata Kunci: Mesatia, Bali, Humanisme, HAM

1.1 PENDAHULUAN

Kematian, sebagai fenomena universal, menyusup ke dalam kehidupan setiap individu. Namun, cara manusia memahami dan mengonseptualisasikan kematian sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya dan kepercayaan agama. Misalnya, di Amerika Serikat, kematian sering dilihat sebagai awal kehidupan, sementara di Polandia, ia sering dianggap sebagai akhir atau pemberian diri. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam pemahaman kematian di antara budaya, di mana satu masyarakat dapat melihatnya secara positif sedangkan yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang negatif.

Selain perbedaan kultural, konsep kematian juga bervariasi dalam konteks agama. Agama Hindu, misalnya, menekankan konsep karma dan keabadian jiwa setelah kematian, yang menyiratkan bahwa kematian adalah bagian dari proses alami kehidupan. Namun, di tengah beragamnya pandangan agama, masing-masing agama memiliki definisi kematian yang unik, serta tradisi yang berbeda dalam menghadapi kematian, seperti upacara pemakaman dalam Islam dan upacara kremasi dalam Hindu.

Di samping tradisi-tradisi yang diterima secara luas, ada juga tradisi yang menuai kontroversi, seperti tradisi *mesatya* di Bali. Upacara ini, yang pada awalnya dianggap sebagai upacara adat, menjadi bahan diskusi karena praktik pembunuhan yang terkait dengannya. Meskipun tidak diakui sebagai tradisi resmi, keberadaannya menimbulkan pertanyaan tentang kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip humanisme.

“A human right definition a universal moral right, somethingg wich all men, everywhere, at all time ought to have, something of wich no way deprived without a grave affront to justice, something wich is owing to every human being simply because he (she) is human (Craston, 1973:36)”

Dari definisi HAM diatas sejumlah definisi lain yang diberikan untuk mencermati atas pemahaman HAM selanjutnya disebut sebagai karakter universal (untuk semua orang, waktu dan tempat), dimiliki oleh semua orang (Chan, 1995: 28) dan harus dilakukan oleh semua manusia (Prajarto: 2003: 317). Dari sisi karakter ini saja sejumlah

gugatan atas HAM kemudian mengemuka. Pertama tentang makna dan aplikasi universalitas HAM. Kedua, benarkan itu dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua orang jika suatu sistem politik tidak memberi ruang yang memadai?.

Sejumlah studi dan kajian yang dilakukan oleh pemerhati HAM mengantar pada sejumlah sebab munculnya gugatan atas ide dan universalitas HAM. Bila disebutkan, gugatan umum tentang universalitas HAM diantaranya sebagai berikut:

1) Universalitas berakar dari pemikiran filosofi dan filosof barat (western bias) dan dari keyakinan kalau semua orang berpikir dalam corak yang seragam (Renteln, 1990: 47-50).

2) Beberapa hak yang termuat dalam Universal Declaration of human rights pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan untuk “all times” (Chan, 1995: 29). Sebagai contoh, hak untuk memilih rakyat atau hak untuk menikah tentunya tidak mungkin diberlakukan pada semua umur. Atas dasar ini maka karakter universal dipandang tidak memenuhi persyaratan lagi.

3) Beberapa hak yang terefleksikan dalam hak asasi manusia cenderung berakar pada ideologi dan budaya liberal dengan mengabaikan nilai-nilai komunitarian yang kemungkinan dipunyai oleh suatu negara dan masyarakat tertentu. Dengan kata lain suatu negara atau masyarakat tertentu pada dasarnya memiliki aturan sendiri dalam melindungi dan mengakui anggotanya.

4) Sejumlah negara asia termasuk indonesia memandang universalitas HAM sebagai bentuk agresivitas, imperialisme kultural, hegemoni global dan pendiktean Barat atas negara berkembang (Ghao, 1995: 56; dan Caballero-Anthony, 1995:40).

Agama yang mulanya dipercaya sebagai penyelenggara HAM mulai kehilangan kepercayaan karena praktik-praktik ekstrem yang dilakukan. Dalam HAM prinsip-prinsip humanisme sebagai cita-cita memanusiakan manusia atau sebagai usaha humanisasi, jika disandingkan dengan cita-cita dalam konteks agama, sebenarnya adalah salah satu bentuk cita-cita yang sama. Pemahaman seperti itu, namun demikian menjadi suatu persoalan tersendiri ketika dalam perkembangan keberadaan agama-agama sering dipandang kontradiktif terhadap usaha memanusiakan manusia. Sejarah hegemoni institusi agama di Abad Pertengahan jelas menimbulkan praktek-praktek penindasan dan

ketidakadilan yang menjauhi prinsip humanisasi. Paradoks yang sering terjadi dalam kehidupan beragama.

Dalam konteks ini, pemahaman tentang HAM dan humanisme menjadi relevan, terutama dalam menghadapi tantangan dari tradisi-tradisi yang mungkin melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sementara agama sering kali dianggap sebagai pemegang nilai-nilai moral, sejarah juga mencatat praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip humanisme.

Melalui makalah ini, kami akan mengeksplorasi upacara mesatya dengan menganalisis beberapa pertanyaan kunci, termasuk definisi upacara mesatya, alasan tidak diakui sebagai tradisi di Bali, dan hubungannya dengan HAM dan teori humanisme. Diharapkan bahwa pemahaman mendalam tentang tradisi ini akan memicu diskusi yang lebih luas tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara kebudayaan dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

2.1 PEMBAHASAN

Upacara mesatia atau mesatya (dalam bahasa Bali berarti “setia”) adalah praktik pemakaman religius yang pernah dilangsungkan di pulau Bali ketika wanita dari keluarga kerajaan yang baru saja menjadi janda membakar diri diatas api kremasi suaminya. Ini menjadi sebuah praktik yang mengandung makna terhadap kematian dan menciptakan kesan keagungan. Upacara mesatia berasal dari keluarga raja atau pemangku kekuasaan seperti yang terlihat dalam sejarah hari raya Hindu. Praktik ini dianggap sebagai dramatisasi terhadap kematian, yang membawa makna kepada keluarga dan komunitas tentang kesetiaan dan keagungan. Upacara mesatia juga merupakan upacara salah satu lima dari tujuan utama upacara melasti, yang juga disebut melis atau mekiyis. Tujuan utama dari upacara ini adalah untuk menghadirkan kepada dewata dan membantu mengeluarkan semangat yang membawa kepada keluarga dan komunitas.

Selain Bali, India juga mempraktikkan upacara mesatia diperkirakan setelah munculnya sistem kasta di India. Di India perempuan yang menjadi satu adalah seorang janda dari kalangan Ksatria, sedangkan di Bali satia biasa dilakukan oleh golongan triwangsa atasan terutama oleh raja-raja dan memang dalam perkembangannya kemudian hanya keluarga raja-raja saja yang melakukannya. Perbuatan satia di Bali sangat disanjung-sanjung lantaran mencerminkan kesetiaan perempuan Bali terhadap suaminya. Pengaruh epos Mahabarata yang terkenal di India sangat mungkin ikut memberi inspirasi

pelaksanaan sati, karena Madri, janda dari Raja Pandu melakukan sati pada waktu pembakaran jenazah suaminya.

Dalam catatan-catatan, babad-babad ataupun paswara-paswara tidak ada informasi mengenai pelaksanaan satia di Bali. Setelah kedatangan orang-orang eropa, yang kebetulan menyaksikan dengan mata kepala sendiri upacara mesatia itu kemudian menuliskan pengalamannya dan mempublikasikannya dalam penerbitan-penerbitan khusus, majalah-majalah dan jurnal-jurnal ilmiah, barulah terungkap ke dunia luar adanya upacara adat Mesatia di Bali dan Bali menjadi “terkenal” sebagai pulau pengorbanan manusia hidup-hidup atau *human sarcifices*, karena yang ikut mesatia di Bali ternyata kebanyakan bukan berasal dari janda-janda atau raja atau sanak keluarganya, tetapi oleh gendakan-gendakannya, pelayannya, karena mesatia di Bali sudah menjadi alat untuk menunjukkan tinggi rendah derajat dan gengsi seorang raja.

Henrich Zollinger seorang biologis yang bertugas di kebun raya di Buitenzorg, sekarang Bogor, mengunjungi Bali pada tahun 1848 untuk mengunjungi Bali pada tahun 1848 untuk mengumpulkan sampel tumbuh-tumbuhan, ia menumpang kapal laut yang membawa serdadu yang melakukan ekspedisi militer terhadap Buleleng, Klungkung dan Karangasem. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Lombok dengan tujuan yang sama, disanalah ia menyaksikan mesatia. Menurut pengakuannya seorang janda yang akan melakukan mesatia sehari setelah kematian suaminya ia akan mandi berkali-kali, mengenakan pakaian bagus, kemudian makan-makanan enak. Sampai pada hari mesatia keluarga dari janda yang menjadi sati bertugas untuk membunuh sati dengan cara menghujam dada kirinya. Setelah pembunuhan yang kejam itu perempuan-perempuan yang mengitari jenazah janda tersebut akan menggulungnya dengan tikar. Kemudian orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut akan kembali melakukan aktivitas normal.

Upacara mesatia dalam pandangan humanis dapat dianggap sebagai praktik yang membantu mengubah kesadaran dan kesetiaan keluarga dan komunitas terhadap kematian. Namun, dalam pelaksanaannya tidak menunjukan sisi kemanusiaan karena upacara mesatia sama saja seperti bunuh diri yang dilakukan atas dasar moral dan adat.

3.1 MENGAPA TRADISI UPACARA MESATIA TIDAK BISA DILANJUTKAN?

Upacara Mesatia telah dilangsungkan secara turun temurun oleh umat Hindu di Bali sejak zaman dahulu dengan tujuan untuk membuktikan kesetiaan dari kaum perempuan kepada suami atau penguasa yang sedang berkuasa saat itu (raja atau ratu), namun pada awal abad ke-20 upacara ini mulai menuai larangan karena bertentangan terhadap HAM dan teori humanisme. Menurut data yang diperoleh pihak yang melarang dilangsungkannya kembali upacara ini ialah Belanda yang melarang secara berturut-turut selama 1904 hingga awal 1905 di berbagai kerajaan di Bali, diantaranya:

1. Kerajaan Tabanan dilarang untuk melakukan upacara Mesatia berdasarkan perjanjian pada tanggal 20 Januari 1904
2. Kerajaan Klungkung dilarang untuk melakukan upacara Mesatia berdasarkan perjanjian pada tanggal 23 November 1904
3. Kerajaan Badung dilarang untuk melakukan upacara Mesatia berdasarkan perjanjian pada tanggal 22 Desember 1904
4. Kerajaan Bangli dilarang untuk melakukan upacara Mesatia berdasarkan perjanjian pada tanggal 19 Januari 1905

Latar belakang Belanda melakukan pelarangan ini adalah munculnya beberapa laporan dari orang-orang Belanda yang melihat sendiri betapa mengerikan serta bar-barnya upacara Mesatia ini, diantaranya:

1. Laporan dari Jan Oosterwijk, yakni seorang pegawai V.O.C dengan jabatannya sebagai Opperkoopman (pedagang kepala) yang diutus ke Bali pada Februari 1633 oleh Gubernur Jenderal, Hendrik Brouwer dengan tugas merayu Dalem Bali sehingga bersedia menggalang kekuatan dalam melawan Mataram serta membeli budak laki-laki untuk di rekrut sebagai tantara kompeni. Sayangnya Oosterwijk ditolak untuk menemui Dalem, dikarenakan adanya upacara pelebonan ibu kandung dari Dalem. Oosterwijk pun diberi kesempatan untuk melihat secara langsung upacara pelebonan tersebut. Sebelum jenazah dari ibunda Dalem tiba di lokasi pelebonan dirinya sempat melihat upacara Mesatia yang dilakukan sebelum lanjut ke upacara pelebon.

Jan Oosterwijk menggambarkan dengan detail upacara yang telah dilihatnya. Diceriterakannya bahwa setelah pakaian para sati (orang yang melakukan satia) diganti dengan pakaian serba putih, tanpa ditutup matanya mereka kemudian digiring oleh para laki-laki ke tempat mesatia, yang salah seorang di antara petugas itu merupakan eksekutornya. Beberapa di antara para Sati itu meminta sebuah keris dari eksekutornya dan dipegang dengan tangan kiri. Setelah mencium keris, tangan kanannya dilukai dengan keris kemudian meminum darah yang keluar dari lukanya kemudian memberi tanda darah

di jidatnya dengan jarinya yang berlumuran darah. Mereka mengembalikan kerisnya kepada eksekutornya, yang segera menikamkannya pada dadanya, dari atas ke bawah ke arah hati dan menusuk hatinya. Setelah para sati meninggal, para keluarga dan kerabat memandikan mayat-mayat mereka dan sesudah diupacarai secara agama yang dipimpin oleh pendeta, mayat-mayat itu lalu dibakar. Pada saat kobaran lidah api menjilat-jilat mayat para sati itu, barulah jenazah ratu tiba di tempat upacara. Tegasnya para satia itu bukan istri-istri raja, tetapi para pelayannya. Dengan demikian satia di Bali tidak sepenuhnya benar sebagai manifestasi kecintaan istri kepada suaminya.

Selain menuliskan apa yang dilihatnya sendiri, Jan Oosterwijck juga memperoleh informasi mengenai pelaksanaan satia yang lain. Dimana sedang berlangsung pelebon Raja yang sedang memerintah, dengan mengorbankan tidak kurang dari 120, 130 dan bahkan sampai 140 para perempuan yang merelakan dirinya untuk menjadi makanan api, sebagai wujud pengabdianya kepada rajanya. Tanpa ada yang ditikam dengan keris sebelum mesatia, mereka langsung terjun ke bara api atas kemauan mereka sendiri. Dia juga mendapat informasi bahwa seorang perempuan janda tanpa anak, mohon kepada ayahnya yang menjadi penguasa di Kuta untuk diizinkan melakukan mesatia pada pelebon suaminya. Dia baru tiga bulan kawin dan masih sangat muda. Ayahnya menyetujuinya karena tindakannya itu menunjukkan kesetiaanya kepada suaminya.

2. Laporan Henrich Zollinger, merupakan seorang biologis yang saat itu bertugas di kebun raya di Buitenzorg (Kebun Raya Bogor) yang mengunjungi Bali pada 1848 untuk mengumpulkan contoh tumbuh-tumbuhan. Disinilah Zollinger menyaksikan upacara mesatia untuk pertama kalinya dalam sebuah laporan dalam jurnal berbahasa Belanda. Dituliskannya bahwa terdapat seorang Gusti yang meninggal dunia dengan meninggalkan tiga janda. Salah seorang di antaranya, yang tidak mempunyai anak, masih muda dan cantik, ingin dibunuh untuk menunjukkan cintanya kepada sang almarhum suaminya, dan dengan perbuatannya itu dia yakin dia akan menjadi istri terpilih yang paling disayangi oleh suaminya di dunia sana.

Sehari setelah kematian suaminya, dia mandi berkali-kali, memakai pakaian yang paling indah, menghabiskan waktunya berhias dan bersenang-senang dengan keluarganya dan kawan-kawannya, makan yang enak-enak, mengunyah sirih, terus-menerus bersembahyang, dan terus-menerus mengenakan pakaian putih. Rambutnya dihiasi bunga kamboja. Dia sangat tenang dan tidak menunjukkan kesedihan atau penyesalan. Pada hari

masatia, seorang perempuan mendudukkannya di depan jenazah suaminya. Dia bersembahyang berkali-kali sambil memutar-mutar ke segala penjuru angin. Sesudah itu dia berdiri tegak, siap masatia.

kakak angkatnya yang berdiri di depannya kemudian bertanya dengan nada yang rendah kepadanya, apakah dia siap untuk mati. Dia mengangguk. Kakaknya mohon dimaafkan karena bertugas membunuhnya. Sesudah itu, tiba-tiba keris di tangan kakaknya menghujam dada kirinya. Tetapi sayang lukanya tidak terlalu dalam. Janda itu masih berdiri. Kakaknya melemparkan kerisnya dan lari menjauhi tempat masatia. Seorang laki-laki lain kemudian maju, melanjutkan kerja yang belum selesai. Dia menikam sekeras-kerasnya dada janda yang malang itu. Janda itu rebah tanpa mengeluarkan jeritan sama sekali. Perempuan-perempuan yang mengitarinya segera menggulungnya dengan tikar, menekan dengan sekeras-kerasnya tubuhnya yang terbungkus agar darahnya cepat mengalir keluar. Ternyata dia masih hidup. Terakhir lelaki tadi segera menikam punggungnya di antara kedua tulang belikatnya dan akhirnya janda itu segera meninggal dunia.

Dengan adanya laporan yang masuk ini, menjadikan pemerintahan Hindia Belanda kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri tradisi upacara Mesatia karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia serta teori humanisme, selain itu beredar pula isu bahwa Belanda takut kehilangan sumber daya manusia untuk wilayah Bali.

4.1 PANDANGAN AGAMA HINDU BALI TERHADAP MESATIA

Istilah Mesatia mulai dikenal oleh Umat Hindu setelah terbitnya Kitab Uttarakanda dalam cerita Ramayana, dimana Uttarakanda sendiri mengisahkan kisah pembuangan Dewi Sinta dikarenakan Sang Rama mendengar desas-desus dari rakyat perihal kesucian dari Dewi Sinta yang sebelumnya telah diculik oleh Rahwana. Kemudian Dewi Sinta tinggal di pertapaan Rsi Walmiki dan melahirkan dua anak dari Rama yakni Kusa dan Lawa. Beberapa tahun setelahnya Sinta kembali ke Ayodya namun belum diperbolehkan masuk ke istana dan harus melakukan suatu ritual penyucian untuk membuktikan dirinya masih suci dengan cara terjun kedalam kobaran api yang sangat besar, apabila api membakarnya berarti dirinya tidak suci dan sebaliknya apabila dirinya tidak terbakar berarti membuktikan dirinya masih suci, dan benar saja tubuh Dewi Sinta tidak terbakar dalam kobaran api yang besar dan membuktikan dirinya masih suci kepada rakyat dan

Sang Rama. Dari cerita tersebutlah Masatia mulai diadopsi oleh Umat Hindu sebagai wujud pembuktian kepada istri atau para pengikut dari raja atau ratu yang berkuasa.

Bagi beberapa Umat Hindu Mesatia merupakan suatu upacara yang dianggap suci dan keramat. Mereka yang melakukannya sudah pasti tidak perlu untuk diragukan kesetiannya, dengan kepercayaan mereka yang melakukan Mesatia nantinya akan menemani suami atau penguasanya di alam sana, tentunya pula atas izin keluarga dari para Sati dan tidak adanya keberatan dari para Sati itu sendiri. Bagi Umat Hindu yang lain upacara Mesatia dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia dan disamakan dengan bunuh diri, hal ini dikarenakan terlahir menjadi manusia merupakan sesuatu yang sulit diperoleh dan butuh ribuan kelahiran dan kematian yang harus dilewati dalam kehidupan sebelumnya. Mereka yang melakukan pembunuhan ataupun bunuh diri pastilah melakukan suatu dosa yang tidak dapat diampuni sehingga kecil kemungkinan bertemu dengan roh dari suami atau penguasanya di alam sana ditambah dengan pola pikir yang menyadari konsep Tat Twam Asi untuk tidak menyakiti dan saling mengasihi sesama makhluk.

5.1 PANDANGAN MASYARAKAT BALI MODERN TERHADAP MESATIA

Pesatnya perkembangan zaman membuat pola pikir masyarakat Bali terhadap suatu tradisi pastinya juga turut mengalami perubahan. Di zaman sekarang apabila kembali dilangsungkan upacara Mesatia pastinya akan langsung menuai kecaman dari berbagai pihak karena sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan dapat terjerat dengan pasal pembunuhan berencana. Kini dengan perkembangan zaman yang telah modern, kesetiaan seorang istri atau pengikut dalam masyarakat Bali dapat diuji dengan berbagai cara dan tidak perlu harus ditikam atau loncat kedalam api yang besar.

Selain Itu Masyarakat Bali kini jauh lebih mementingkan melestarikan beberapa tradisi yang dianggap dapat dijadikan sebagai destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakatnya sendiri dan juga sebagai pemasukan bagi provinsi. Kemudian dengan adanya upacara Mesatia merupakan suatu tindakan pemborosan sumber daya manusia di Bali yang juga merupakan sumber pemasukan bagi Republik Indonesia dengan memanfaatkan pariwisatanya yang mampu memikat para wisatawan domestic dan internasional untuk datang.

6.1 Teori Kemanusiaan dan kaitannya dengan upacara mesatia

Kita bertolak dari pengandaian bahwa transformasi raksasa yang sedang dialami oleh semua bangsa di dunia dewasa ini, yaitu modernisasi, memaksa semua masyarakat untuk memastikan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam tatanan kehidupan bersama. Acuan pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang telah tertanam dalam struktur-struktur dan nilai-nilai sosial budaya tradisional tidak mencukupi lagi karena struktur kehidupan masyarakat semakin cepat mengalami perubahan yang membuat nilai-nilai tradisional tidak lagi operasional. Yang perlu bukan sekedar menggantikan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai baru. Tidak ada nilai universal yang lepas sama sekali dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing masyarakat. Setiap masyarakat tetap harus sendiri merumuskan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan cita-cita kehidupan bersama.

Tetapi yang membedakan situasi sekarang dari situasi abad 20 ialah bahwa dunia semakin menjadi satu, dalam hal-hal yang buruk dan juga dalam hal-hal yang baik. Oleh karena itu nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan cita-cita manusia sebagai manusia perlu dirumuskan secara eksplisit. Bukan untuk secara seragam dipasang diatas semua masyarakat, melainkan untuk menjadi acuan dan unsur usaha setiap masyarakat untuk merumuskan kembali kriteria etis kehidupan bersama. Kriteria itu harus bersifat operasional.

Berikut ini perlu dicoba untuk merumuskan kriteria hakikat kemanusiaan tatanan kehidupan masyarakat yang maksudnya bukan menggantikan keiteria yang dirumuskan oleh setiap masyarakat menurut pemahaman dan wawasannya sendiri, melainkan sebagai tantangan, cita-cita dan prinsip dasar kehidupan masyarakat atau, itu hanya rumus lain untuk hal yang sama: kriteria legimitasi struktur-struktur kekuasaan sosial, politik, ekonomi, budaya dan ideologis sebuah masyarakat hanya memadai secara etis, jadi dilihat dari segi martabat manusia, sejauh nilai-nilai kemanusiaan universal menjadi operasional di dalamnya.

7.1 Mencari nilai-nilai kemanusiaan universal

1. Martabat manusia

Nilai-nilai kemanusiaan universal berakar dalam martabat manusia. Apa yang dimaksud dengan istilah itu?

”martabat” berarti ”derajat” atau ”pangkat”. Jadi ”martabat manusia” adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain ”martabat manusia” mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain di bumi.

Apa inti dari martabat manusia? Perlu disadari bahwa jawaban atas pertanyaan itu tidak dapat dibuktikan seperti kita membuktikan kemampuan tenaga otot manusia untuk menerbangkan sebuah pesawat sejauh 50 kilometer. Pengakuan terhadap martabat manusia akitnya merupakan hal keyakinan dan keterlibatan dasar, sama halnya dengan pengakuan bahwa manusia mempunyai hati nurani dan wajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa kita harus memperlakukan orang lain dengan adil, bahwa kita dapat mempercayai orang lain, atau bahwa tanpa alasan tidak boleh kita tipu. Siapa yang tidak mau mengakui perbedaan haiki antara saya dengan seekor hewan tidak dapat saya paksa (akan tetapi akan saya hindari karena saya anggap bahaya).

Kalaupun martabat manusia tidak dapat dibuktikan hitam diatas putih, kita dapat memperlihatkan dasarnya. Keluhuran manusia berakar dalam kenyataan bahwa ia berakal-budi. Melalui akal budi ia mengatasi keterikatan binatang pada lingkungan dan kebutuhannya sendiri. Akal budi berarti bahwa hati dan wawasan manusia merentangkan diri mengatasi segala keterbatasan ke arah cakrawala yang tak terbatas. Karena jangkauannya itu ia tidak terikat pada satu titik lingkungan serta satu instingtualnya. Oleh karena itu ia dapat berhadapan dengan manusia lain dan alam secara sadar. Ia terbuka pada seluruh realitas.

Keterbukaan itu berarti bahwa, meskipun ia hidup dialam terbatas, namun pengertiannya tidak pernah sampai pada suatu batas yang tidak dapat dilampaui lagi. Jadi pada disket rentangan rohnya tak pernah penuh dengan informasi dari alam yang tidak terhingga, bahwa segenap batas pengertian hanya sebagai rangsangan, bahwa ia mengatasi—”mentransendir”—keterbatasan alam indrerawi. Keterbukaan itu sekaligus berarti bahwa rangsangan dan insting apapun tidak dapat mengikat dan menentukan kelakuannya: ialah makhluk yang bebas. Bebas dalam artian akhirnya dia sendirilah yang menentukan sikap mana yang diambilnya terhadap apapun yang dihadapinya.

Wawasan yang merentangkan diri pada yang tak terbatas dan kebebasan dalam penentuan diri (yang sekaligus merupakan keharusan dari padanya dia tidak dapat lari) menyatakan diri dalam suara hatinya, dalam kesadarannya akan tanggung jawabnya

sebagai manusia. Suara hati manusia menjadi saksi bahwa, apapun ketergantungannya dari lingkungan sosial dan dari mekanisme-mekanisme psikis, namun akhirnya ia sendirilah yang tanggung jawab atas sikap dan perbuatannya, dari padanya ia tidak dapat lari. Dengan demikian suara hati memberi kesaksian, bahwa ia bukan sekedar fungsi dalam neraca pertukaran zar alam, melainkan merupakan makhluk unik, yang tak tertukar, yang terbuka, yang mengatasi keterbatasannya dalam ruang dan waktu, yang tidak ditentukan saja oleh segala faktor, melainkan harus menentukan diri sendiri.

Wawasan ini mencapai ungkapan yang paling mendalam dalam keterbykaan manusia terhadap yang tidak terhingga, terhadap sapaan tuhan. Meskipun yang tak terhadap tidak dapat dijangkau oleh kekuatan akal manusia, akan tetapi manusia lain dari binatang, dapat membuka diri kepadaNya, dapat merentangkan diri kepadaNya. Manusia dapat dipanggil olehNya. Bahkan baru pada tak terhingganya rentangan hati manusia yang tak terhingga menemukan pemenuhannya (Augustinus: hatiku gelisah sampai beristirahat dalam Dikau, ya tuhanku). Dan dari wahyu agama itu kita mengetahui bahwa rentangan itu tidak percuma, bahwa yang tak terhingga sendiri mengambil inisiatif untuk menyapa manusia, bahwa segenap orang secara pribadi dikehendaki dan diciptakan olehNya serta dipanggil untuk keselamatan kekal. Manusia mengatasi bumi ini karena ia dipanggil untuk hidup apabila sudah mati. Segenap orang berdimensi abadi. Oleh karena itu setiap orang, pria dianggap hina, berkedudukan tinggi, pria atau wanita, kaya atau miskin, kuasa lemah, terpandang, atau terlupakan, secara manusia dasar akhir manusia terdapat pada panggilan terakhirnya.

Jadi manusia dibedakan dari binatang karena ia berakal, berbudi dan berkebebasan, karena ia bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena ia disapa serta dipanggil secara pribadi olehNya. Martabat manusia berdasarkan dimensi atas dunia dan mutlak yang ada pada setiap orang (yang dalam filsafat segala zaman sudah selalu disangka dan digapai, apa itu definisi manusia sebagai *zoom legon echon*, insan kamil atau ksatriya pinandita atau dalam spekulasi platon tentang *anamesis* atau dalam faham *jumuhing kawula Gusti*). Dengan demikian martabat manusia mengimplikasikan bahwa setiap orang, setiap individu, bernilai pada dirinya sendiri. Jadi tidak hanya bernilai sebagai anggota kelompok atau karena ia bermanfaat bagi orang banyak. Setiap orang berada dalam eksistensi karena ia ada, karena secara individual dikehendaki. Setiap orang bernilai pada dirinya sendiri. Lepas dari segala manfaatnya sebagai masyarakat ataupun negara. Kita baru bergerak pada tingkat kemanusiaan apabila orang mana dan apapun

tidak kita lihat dari apa ia adalah orang ini dan itu, sepaham atau seagama dengan kita atau tidak. Melainkan sebagai manusia. Seseorang baru diperlakukan sebagai manusia apabila ia diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri tidak pernah hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan luarnya saja.

Martabat ini membedakan manusia dengan binatang. Binatang individual hidup demi eksistensi kelompok. Tujuan binatang individual adalah “survival of the species”. Manusia tidak. Maka pengakuan manusia sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri mengimplikasikan penolakan terhadap segala kolektivisme. Sama saja apakah kolektivisme bersifat rasis, komunis, atau populis. Kolektivisme tidak mengharagai masing-masing orang, melainkan hanya kolektif, kelompok. Masing-masing orang sekadar roda gigi dalam sebuah mesin, sekadar sarana agar kolektif mencapai tujuannya. Seperlunya individu dengan harapan dan cita-citanya dikorbankan.

Tidak mungkin menghormati manusia atau memajukan masyarakat kecuali martaat anggotanya sebagai manusia sepenuhnya dihormati. Hanya dengan demikian sebagai manusia sepenuhnya dihormati. Hanya dengan demikian manusia dibedakan dari binatang. Tujuan-tujuan gemilang apapun tidak boleh dibeli dengan menodai martabat seseorangpun. Oleh karena itu pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri merupakan pengandaian pembangunan masyarakat yang manusiawi dan etis. Pengakuan itu merupakan keterlibatan pada harkat kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perlu ditanggapi sebuah salah paham pengakuan terhadap martabat masing-masing individu manusia tidak sama dengan individualisme. Manusia secara hakiki merupakan makhluk sosial. Sebagaimana dapat diperhatikan pada awal penulisan ini, dampak sosial budaya masuk pada inti kepribadian manusi. Manusia secara hakiki tergantung satu sama lain. Tidak ada orang masuk ke dalam kehidupan kecuali berkat manusia lain. Manusia harus hidup dengan manusia-manusia lain diatas dunia dan dari dunia yang satu yang terbatas ini (Bahwa kaitannya dengan lingkungan sosial meresapi seluruh diri seseorang nampak paling jelas dari fenomena identitas unik dan tanggung jawab otonom kita ungkapkan melalui bahasa, padahal bahasa secara hakiki merupakan realitas sosial). Oleh karea itu hakekatnya sebagai manusia hanya dapat tercapai melalui kesetiakawanan dengan semua tingkat dalam kehidupannya, dari lingkungan sosial, lingkungan adat, sampai keluarga dan tingkat tertinggi yaitu nasional. Tetapi martabat

manusia hanya bisa direalisasikan pada jenjang teoritikal dan dianggap sebagai dogma dalam tradisi sosial dan budaya.

2. Hak-hak dasar setiap orang sebagai manusia wajib dihormati.

Prinsip ini prinsip hak-hak asasi manusia. Tidak mungkin membangun masyarakat yang sungguh-sungguh manusiawi kecuali keutuhan setiap anggotanya dihormati. Paham hak asasi manusia berdasarkan keyakinan bahwa manusia. Karena manusia ia mendahului segala perundangan, memiliki hak-hak yang wajib dihormati. Dan karena manusia menerima kemanusiaannya itu dari Tuhan yang menciptakannya, maka hak-hak asasi manusia diterima dari Tuhannya sendiri. Hak-hak itu berlaku, entah diakui atau tidak dalam sistem hukum yang bersangkutan. Hak-hak itu justru mengimplikasikan tuntutan agar diberi perlindungan hukum penuh. Harakat kehidupan bersama sebuah masyarakat diukur dari hormat yang diberikannya kepada hak-hak dasar manusia.

Kesadaran akan hak-hak asasi manusia merupakan hasil sebuah proses historis yang masih sedang berjalan. Manusia yang telah kehilangan perlindungan struktur-struktur sosial tradisional menemukan diri berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang membahayakan keutuhan, eksistensi, dan merabatnya. Berhadapan dengan ancaman-ancaman ini manusia menjadi sadar akan segi-segi eksistensinya yang mana perlu dilindungi agar martabatnya sebagai manusia tetap utuh. Tuntutan perlindungan terhadap segi-segi hakiki kemanusiaannya itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia. Maka dalam perumusan hak-hak masing-masing manusia kita dapat menemukan keprihatinan, kadang juga prasangka zaman dan lingkup budaya tertentu. Oleh karena itu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tidak berarti bahwa sebuah daftar dari sebuah lingkungan sosial-budaya lain begitu saja diambil oper. Setiap lingkungan masyarakat memiliki pengalaman-pengalaman buruk dan dengan demikian menjadi keprihatinan sendiri oleh karena itu akan membuat prespektif tentang pemahaman hak asasi manusia dari pemikirannya sendiri.

Filsafat humanisme tidak hanya mencakup pengakuan terhadap nilai-nilai budaya, tetapi juga mengajarkan pentingnya memahami konteks historis, sosial, dan ekonomis di mana budaya tersebut berkembang. Budaya tidak hanya merupakan warisan tradisional yang dilestarikan dari generasi ke generasi, tetapi juga merupakan produk dari interaksi kompleks antara individu, kelompok, dan institusi dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini, filsafat humanisme menekankan pentingnya melihat budaya sebagai suatu proses yang

terus berubah dan berkembang seiring waktu, bukan sebagai entitas yang statis atau tertentu.

Dalam konteks ini, humanisme mempromosikan gagasan inklusivitas dalam budaya, yang mengakui dan menghargai kontribusi dari berbagai kelompok dan komunitas dalam menciptakan keberagaman budaya yang kaya dan dinamis. Ini mencakup pengakuan terhadap berbagai sub-kultur, kelompok etnis, agama, gender, dan orientasi seksual yang mungkin ada dalam suatu masyarakat. Humanisme menolak ide dominasi budaya oleh satu kelompok atau pandangan dunia tertentu, dan mengadvokasi untuk pendekatan yang inklusif dan beragam terhadap pembangunan budaya.

Selain itu, humanisme menyoroti pentingnya memerangi prasangka dan diskriminasi dalam semua bentuknya dalam konteks budaya. Ini termasuk kesadaran terhadap bias rasial, gender, kelas, dan orientasi seksual yang mungkin ada dalam pembentukan budaya. Humanisme mendorong kita untuk mengenali dan mengatasi ketidakadilan serta ketimpangan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi akses individu terhadap pengalaman budaya dan ekspresi diri.

Selanjutnya, dalam konteks globalisasi dan modernisasi, humanisme menantang kita untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap keberagaman budaya. Humanisme menekankan pentingnya mempertahankan keanekaragaman budaya di tengah arus globalisasi yang sering kali mengarah pada homogenisasi budaya. Ini melibatkan upaya untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya yang unik serta untuk mendukung ekspresi budaya yang beragam di seluruh dunia.

Dengan demikian, filsafat humanisme memberikan landasan yang komprehensif untuk memahami hubungan antara manusia dan budaya dalam semua dimensinya. Ini mencakup pengakuan terhadap keberagaman budaya, promosi inklusivitas dan keadilan, serta perlindungan terhadap warisan budaya di tengah perubahan dan tantangan zaman modern.

Dalam konteks pandangan HAM yang dicantumkan pada pendahuluan, diperluasnya teori melibatkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek yang relevan dengan diskusi tersebut.

1. Konseptualisasi Kematian dalam Konteks Budaya dan Agama: Pemahaman tentang bagaimana konseptualisasi kematian dipengaruhi oleh budaya dan agama membawa implikasi signifikan terhadap pemahaman tentang HAM. Diskusi ini akan mencakup

analisis tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan agama dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal, serta bagaimana interpretasi budaya dan agama dapat menjadi landasan untuk menjustifikasi pelanggaran HAM atau perlindungan yang lebih baik terhadap individu.

2. Tradisi dan Kontroversi Terkait Kematian: Lebih jauh lagi, eksplorasi tentang tradisi-tradisi yang terkait dengan kematian dan kontroversi yang melingkupinya memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara budaya, agama, dan HAM. Poin ini akan melibatkan analisis tentang bagaimana tradisi-tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang mendasarinya, serta bagaimana dampaknya terhadap hak-hak individu dan perlindungan HAM secara keseluruhan.

3. Relevansi Hak Asasi Manusia dan Humanisme: Perluasan teori juga memungkinkan eksplorasi tentang relevansi konsep HAM dan humanisme dalam menghadapi tantangan dari tradisi-tradisi yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Diskusi yang lebih mendalam akan mencakup evaluasi terhadap efektivitas konsep HAM dan humanisme dalam memperkuat perlindungan terhadap individu dan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks budaya dan agama yang beragam.

4. Peran Agama dalam Konteks HAM: Tinjauan yang lebih luas tentang peran agama sebagai pemegang nilai-nilai moral dan pengatur HAM menjadi penting untuk memahami kompleksitas hubungan antara agama dan HAM. Analisis yang lebih mendalam akan mencakup evaluasi terhadap peran agama dalam mempromosikan atau menghambat pemenuhan HAM, serta bagaimana agama dapat berkontribusi dalam memperkuat prinsip-prinsip HAM secara global.

5. Refleksi terhadap Tradisi dan Revitalisasi Nilai Humanisme: Perluasan teori juga mencakup refleksi yang lebih dalam tentang bagaimana refleksi terhadap tradisi-tradisi yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dapat memicu revitalisasi nilai-nilai humanisme dalam masyarakat. Diskusi akan mencakup strategi yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara menghormati tradisi budaya dan agama dengan memastikan perlindungan yang adekuat terhadap HAM individu dan kelompok.

8.1 KESIMPULAN

Tradisi upacara mesatia tidak bisa lagi berlangsung di Bali karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan teori humanisme. Dilarangnya upacara mesatia di Bali ini sudah berlangsung lama sejak dilarang oleh Belanda, seperti Kerajaan Tabanan yang dilarang melakukan upacara mesatia pada tahun 1904, Kerajaan Klungkung pada tahun 1904, Kerajaan Badung pada tahun 1904 dan Kerajaan Bangli pada tahun 1905. Latar belakang larangan yang dilakukan oleh Belanda ini merupakan bentuk ketegasan mereka terhadap tindak kemanusiaan dan pelanggaran HAM, dalam teori yang disajikan pada bab pembahasan yang menjelaskan tentang martabat manusia merupakan teori yang sudah terkenal di zaman Eropa dan sebagai bentuk refleksi mereka terhadap tradisi yang meliatkan kekerasan dan perenggutan hak perempuan yang masif dilakukan saat itu. Kesadaran Belanda akan tindak kekerasan dan perenggutan hak perempuan ini muncul pada saat laporan yang dilakukan oleh Jan Oosterwijck yang menggambarkan dengan detail upacara yang telah dilihatnya dan diceritakan bahwa setelah pakaian para *sati* (orang yang melakukan satia) diganti dengan pakaian serba putih, tanpa ditutup matanya yang kemudian digiring oleh laki-laki ke tempat *mesatia*, yang salah seorang diantara perugas itu merupakan eksekutor. Beberapa diantara para *sati* itu meminta sebuah keris dari eksekutornya dan dipegang dengan tangan kiri. Setelah mencium tangan kanannya dilukai dengan keris kemudian meminum darah yang keluar dari lukanya kemudian memberi tanda darah di jidatnya dengan jarinya yang berlumuran darah. Mereka mengembalikan kerisnya kepada eksekutornya, yang segera menikamkannya pada dadanya, dari atas ke bawah ke arah hati dan menusuk hatinya. Setelah para *sati* meninggal, para keluarga dan kerabat memandikan mayat-mayat mereka dan sesudah diupacarai secara agama yang dipimpin oleh pendeta, mayat-mayat itu lalu dibakar. Pada saat kobaran lidah api menjilat-jilat mayat para *sati* itu, barulah jenazah ratu tiba di tempat upacara. Tegasnya para *sati* itu bukan istri-istri raja, tetapi para pelayannya. Dengan demikian *sati* di Bali tidak sepenuhnya benar sebagai manifestasi kecintaan istri kepada suaminya. Selain menuliskan apa yang dilihatnya sendiri, Jan Oosterwijck juga memperoleh informasi mengenai pelaksanaan *sati* yang lain. Dimana sedang berlangsung peleton Raja yang sedang memerintah, dengan mengorbankan tidak kurang dari 120, 130 dan bahkan sampai 140 para perempuan yang merelakan dirinya untuk menjadi makanan api, sebagai wujud pengabdianya kepada rajanya. Tanpa ada yang ditikam dengan keris sebelum *mesatia*, mereka langsung terjun ke bara api atas kemauan mereka sendiri. Dia

juga mendapat informasi bahwa seorang perempuan janda tanpa anak, mohon kepada ayahnya yang menjadi penguasa di Kuta untuk diizinkan melakukan mesatia pada peleton suaminya. Dia baru tiga bulan kawin dan masih sangat muda. Ayahnya menyetujuinya karena tindakannya itu menunjukkan kesetiaannya kepada suaminya.

Dalam pandangan humanisme yang dikutip dari penulisan ini merupakan teori yang sudah beredar sejak zaman romawi kuno yang artinya masyarakat eropa sebagian besar sudah menguasai dasar-dasar dari humanisme tersebut. Seperti dalam laporan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menghentikan upacara tersebut dengan dalih Hak Asasi Manusia dan Humanisme, dari dasar pernyataan tersebut menunjukan teori humanisme (kemanusiaan) dan Hak Asasi Manusia sudah menjadi landasan bagi mereka dimana martabat manusia dijunjung tinggi dan memiliki hak yang sama antara perempuan dan juga laki-laki.

Namun pada kondisi yang sama menurut penulis sangat kontradiktif dengan aturan yang belanda keluarkan mengenai pelarangan upacara mesatia yang disebutkan bahwa upacara tersebut menjadi tradisi yang menjadi percobaan pembunuhan. Dengan kondisi Belanda yang masih menjadi pihak penjajah dan masih banyak praktik kejam yang dilakukan oleh Belanda tentu teori humanisme dan HAM menjadi nearmakna karena tidak bisa mempraktikkan kepada tindakannya sendiri.

Pada kesimpulan ini penulis menyimpulkan bahwasannya tradisi mesatia tidak dapat dilakukan kembali oleh masyarakat Bali terkhusus Bali modern seperti sekarang karena adanya tindak kekerasan dan kekejaman terhadap perempuan, hal yang tidak dapat dibenarkan sama sekali, sekalipun itu praktik keagamaan atau kepercayaan. Sekalipun tradisi ini diteruskan akan terdapat banyak modifikasi atau perubahan secara total dimana tidak ada korban dalam satu tradisi kebudayaan.

REFERENCES

- AA Seru Kusniarti, I. B. (2021). *Bala Kanda hingga Uttara Kanda, Berikut Bagian Epos Ramayana*. Bali: Tribun-Bali.com.
- Dalu, Pondok Ki Buyut. (2015, November 18). Adat Mesatya Di Bali (4) Kesaksian Zollinger (1846). *Kanduk supatra blogspot*, p. 1.
- Hadi, S. (2012). Konsep Humanisme Yunani Kuno dan Perkembangan Sejarah Pemikiran Filsafat. *Jurnal Filsafat Vol.22, No. 2*, 108.
- Pondok Ki Buyut Dalu. (2015, November 18). Adat Mesatya Di Bali (2) Kesaksian Oosterwijck (1633). *Kanduk Supatra Blogspot*, p. 1.
- Pondok Ki Buyut Dalu. (2015, November 15). Adat Mesatya di Bali (7) Belanda Menghapuskan Adat Mesatya di Bali. *Kanduk Supatra Blogspot*, p. 1.
- Prajarto, K. K. (2005). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju Democratic Governance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.8,No.3*.
- Suseno, F. M. (1991). *Berfilsafat Dari Konteks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Windia, W. P. (2017). Laki-laki dalam Asuhan Feminisme. *Bedah Buku* (pp. 1-20). Sanur Denpasar: Simdos.unud.ac.id.